



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2821 K/80/MEEM/2007**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH
PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
UNTUK TAHUN 2008**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2008 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2381);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4360);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
10. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Konsultasi Menteri Teknis Dengan Menteri Dalam Negeri Dalam Rangka Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Penghasil Tahun 2008 tanggal 3 Oktober 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2008.

Pasal 1

Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil adalah sebagai berikut :

- a. Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil Sektor Pertambangan Umum adalah :
 1. Prakiraan penerimaan dari luran Tetap/Landrent yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai tahap kegiatan);
 2. Prakiraan penerimaan dari luran Eksplorasi/luran Eksploitasi/Royalty yang dihitung dari jumlah produksi x tarif x harga jual.
- b. Dasar penghitungan bagian Daerah Penghasil Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah *lifting* (prakiraan produksi dikurangi prakiraan pemakaian sendiri) Minyak Bumi dan Gas Bumi dari kegiatan PT Pertamina (Persero) sendiri, kegiatan Kontrak *Production Sharing* dan/atau kegiatan kontrak kerja sama lainnya di daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ditetapkan sebagai Daerah Penghasil dan dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2008 masing-masing sektor Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :

- a. Sektor Pertambangan Umum Tahun 2008, sejumlah 1 (satu) Provinsi, 174 (seratus tujuh puluh empat) Kabupaten dan 10 (sepuluh) Kota, serta dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;

- b. Sektor Pertambangan Minyak Bumi Tahun 2008, sejumlah 6 (enam) Provinsi, 51 (lima puluh satu) Kabupaten dan 5 (lima) Kota, serta dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini;
- c. Sektor Pertambangan Gas Bumi Tahun 2008, sejumlah 4 (empat) Provinsi, 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 5 (lima) Kota, serta dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

Pasal 3

Penetapan daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Sektor Pertambangan Umum :
 1. Daerah penghasil Iuran Tetap (*Landrent*) adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara;
 2. Daerah penghasil Royalty adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.
- b. Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi :

Daerah penghasil adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan memiliki lokasi sumur produksi yang menghasilkan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.

Pasal 4

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2007



a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SEKRETARIS JENDERAL,

WARYONO KARNO

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
8. Para Gubernur yang bersangkutan
9. Para Bupati/Walikota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2821 K/80/MEM/2007

TANGGAL : 29 Oktober 2007

DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL
SEKTOR PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2008

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Nanggroe Aceh Darusallam		0	58.545.900	58.545.900
1	Kab. Pidie	KK	0	30.257.500	30.257.500
2	Kab. Aceh Barat	KK	0	24.934.000	24.934.000
3	Kab. Aceh Besar	KP	0	2.499.000	2.499.000
4	Kab. Aceh Singkil	KK	0	855.400	855.400
II	Sumatera Utara		0	1.471.271.600	1.471.271.600
1	Kab. Tapanuli Selatan	KK	0	495.017.250	495.017.250
2	Kab. Mandailing Natal	KK	0	383.951.750	383.951.750
3	Kab. Tapanuli Tengah	KK	0	239.239.000	239.239.000
4	Kab. Dairi	KK	0	119.473.900	119.473.900
5	Kab. Tapanuli Utara	KK	0	108.108.000	108.108.000
6	Kota Padang Sidempuan	KK	0	90.317.500	90.317.500
7	Kab. Humbang Hasundutan	KP	0	22.517.500	22.517.500
8	Kab. Nias	KP	0	8.215.000	8.215.000
9	Kab. Pakpak Barat	KK	0	4.431.700	4.431.700
III	Sumatera Barat		2.430.000.000	602.168.085	3.032.168.085
1	Kota Sawahlunto	KP, PKP2B	2.010.000.000	398.538.910	2.408.538.910
2	Kab. Sawahlunto Sijunjung	KP, PKP2B	420.000.000	98.084.595	518.084.595
3	Kab. Pesisir Selatan	KP	0	43.312.500	43.312.500
4	Kab. Solok	KP, PKP2B	0	37.291.480	37.291.480
5	Kab. Limapuluh Kota	KP	0	17.575.600	17.575.600
6	Kab. Dharmasraya	KP	0	5.625.000	5.625.000
7	Kab. Pasaman	KP	0	1.740.000	1.740.000
IV	Riau		22.056.000.000	1.536.565.400	23.592.565.400
1	Kab. Indragiri Hulu	KP, PKP2B	17.836.000.000	1.031.165.500	18.867.165.500
2	Kab. Kuantan Sisingi	KP, PKP2B	3.500.000.000	222.453.400	3.722.453.400
3	Kab. Si a k	KP	720.000.000	25.025.000	745.025.000
4	Kab. Kampar	KP	0	91.161.000	91.161.000
5	Kab. Bengkalis	KP	0	85.642.000	85.642.000
6	Kab. Indragiri Hilir	PKP2B	0	65.156.000	65.156.000
7	Kab. Rokan Hulu	KP	0	8.000.000	8.000.000
8	Kab. Pelalawan	KP, PKP2B	0	7.962.500	7.962.500
V	Kepulauan Riau		55.406.950.000	1.465.239.550	56.872.189.550
1	Kab. Karimun	KP, KK	39.466.700.000	369.287.550	39.835.987.550
2	Kab. Bintan	KP	9.009.000.000	372.349.000	9.381.349.000
3	Kab. Lingga	KP	2.426.750.000	153.150.000	2.579.900.000
4	Pem. Prov. Kep. Riau	KP	4.504.500.000	569.203.000	5.073.703.000
5	Kab. Kep. Natuna	KP	0	1.250.000	1.250.000
VI	Jambi		12.489.750.000	853.703.250	13.343.453.250
1	Kab. Bungo	KP, PKP2B	11.466.000.000	106.820.600	11.572.820.600
2	Kab. Batanghari	KP, PKP2B	1.023.750.000	255.792.350	1.279.542.350
3	Kab. Merangin	KP	0	240.960.000	240.960.000
4	Kab. Sarolangun	KP, PKP2B	0	179.742.300	179.742.300
5	Kab. Tebo	KP	0	38.000.000	38.000.000
6	Kab. Tanjung Jabung Barat	KP	0	32.388.000	32.388.000

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
VII	Sumatera Selatan		125.488.500.000	3.259.303.384	128.747.803.384
1	Kab. Muara Enim	KP, PKP2B	106.293.000.000	776.836.780	107.069.836.780
2	Kab. Lahat	KP, PKP2B	19.195.500.000	388.608.200	19.584.108.200
3	Kab. Musi Banyuasin	KP, PKP2B	0	1.028.571.809	1.028.571.809
4	Kab. Musi Rawas	KP, KK, PKP2B	0	424.507.300	424.507.300
5	Kab. Ogan Komering Ulu	KP, PKP2B	0	311.136.750	311.136.750
6	Kab. Banyuasin	KP, PKP2B	0	263.765.795	263.765.795
7	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	KP, PKP2B	0	65.876.750	65.876.750
VIII	Kep. Bangka Belitung		313.631.500.000	12.298.608.845	325.930.108.845
1	Kab. Bangka Induk	KP	99.099.000.000	3.522.325.000	102.621.325.000
2	Kab. Bangka Selatan	KP, KK	79.807.000.000	2.485.558.500	82.292.558.500
3	Kab. Bangka Barat	KP	53.053.000.000	2.178.712.500	55.231.712.500
4	Kab. Bangka Tengah	KP, KK	49.140.000.000	1.858.283.595	50.998.283.595
5	Kab. Belitung Timur	KP	17.517.500.000	1.637.938.500	19.155.438.500
6	Kab. Belitung Induk	KP	15.015.000.000	495.840.750	15.510.840.750
7	Kota Pangkal Pinang	KP	0	119.950.000	119.950.000
IX	Bengkulu		3.282.375.000	443.323.330	3.725.698.330
1	Kab. Bengkulu Utara	KP	2.218.125.000	216.613.250	2.434.738.250
2	Kab. Seluma	KP	1.064.250.000	180.749.720	1.244.999.720
3	Kab. Bengkulu Selatan	SIPP	0	18.746.340	18.746.340
4	Kab. Kaur	SIPP	0	11.082.020	11.082.020
5	Kab. Rejang Lebong	KP	0	10.932.000	10.932.000
6	Kab. Kepahyang	KP	0	5.200.000	5.200.000
X	Lampung		24.375.000	396.546.330	420.921.330
1	Kab. Tanggamus	KP, KK	5.625.000	330.131.830	335.756.830
2	Kab. Lampung Barat	KK	0	39.858.000	39.858.000
3	Kab. Lampung Selatan	KP	18.750.000	18.347.500	37.097.500
4	Kab. Way Kanan	KP, PKP2B	0	8.209.000	8.209.000
XI	Jawa Barat		20.035.395.759	448.358.130	20.483.753.889
1	Kab. Bogor	KP	20.034.045.759	184.921.060	20.218.966.819
2	Kab. Sukabumi	KP	0	129.195.300	129.195.300
3	Kab. Cianjur	KP	0	61.406.000	61.406.000
4	Kab. Garut	KP	0	33.991.200	33.991.200
5	Kab. Bandung	KP	0	29.316.320	29.316.320
6	Kab. Purwakarta	KP	1.350.000	2.450.000	3.800.000
7	Kab. Tasikmalaya	KP	0	7.078.250	7.078.250
XII	Banten		639.949.756	20.553.500	660.503.256
1	Kab. Lebak	KP	639.949.756	17.873.500	657.823.256
2	Kab. Pandeglang	KP	0	2.680.000	2.680.000
XIII	Jawa Tengah		784.875.000	63.215.500	848.090.500
1	Kab. Purworejo	KP	750.750.000	56.807.500	807.557.500
2	Kab. Cilacap	KP	34.125.000	6.408.000	40.533.000
XIV	Daerah Istimewa Yogyakarta		0	41.525.720	41.525.720
1	Kab. Kulonprogo	KP	0	41.525.720	41.525.720

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XV	Jawa Timur		373.529.550	248.109.400	621.638.950
1	Kab. Jombang	KP	274.050.000	25.501.750	299.551.750
2	Kab. Jember	KP	0	90.423.900	90.423.900
3	Kab. Pasuruan	KP	45.504.550	36.619.000	82.123.550
4	Kab. Trenggalek	KP	15.300.000	26.670.500	41.970.500
5	Kab. Banyuwangi	KP	38.675.000	668.000	39.343.000
6	Kab. Madiun	KP	0	21.747.000	21.747.000
7	Kab. Ponorogo	KP	0	19.636.000	19.636.000
8	Kab. Pacitan	KP	0	14.233.250	14.233.250
9	Kab. Lumajang	KP	0	12.610.000	12.610.000
XVI	Kalimantan Barat		12.937.500.000	2.881.274.900	15.818.774.900
1	Kab. Ketapang	KP	11.250.000.000	1.215.133.500	12.465.133.500
2	Kab. Sanggau	KP	1.687.500.000	974.915.000	2.662.415.000
3	Kab. Sintang	KP, KK, PKP2B	0	266.919.000	266.919.000
4	Kab. Kapuas Hulu	KP	0	244.840.000	244.840.000
5	Kab. Sambas	KP	0	73.080.250	73.080.250
6	Kab. Bengkayang	KP	0	68.477.150	68.477.150
7	Kab. Melawi	KP	0	12.500.000	12.500.000
8	Kab. Sekadau	KP	0	10.000.000	10.000.000
9	Kab. Pontianak	KK, KP	0	3.500.000	3.500.000
XVII	Kalimantan Tengah		39.042.550.000	6.185.727.900	45.228.277.900
1	Kab. Murung Raya	KP, KK, PKP2B	32.810.050.000	3.359.937.500	36.169.987.500
2	Kab. Kotawaringin Timur	KP	3.150.000.000	137.662.100	3.287.662.100
3	Kab. Kotawaringin Barat	KP, KK	2.475.000.000	45.809.250	2.520.809.250
4	Kab. Barito Utara	KP, PKP2B	0	1.015.174.650	1.015.174.650
5	Kab. Katingan	KP, KK	270.000.000	195.861.800	465.861.800
6	Kab. Gunung Mas	KP, KK	0	426.596.415	426.596.415
7	Kota Palangkaraya	KP	337.500.000	33.087.600	370.587.600
8	Kab. Barito Timur	KP, PKP2B	0	300.646.270	300.646.270
9	Kab. Kapuas	KP, KK, PKP2B	0	274.731.085	274.731.085
10	Kab. Barito Selatan	KP, PKP2B	0	265.365.230	265.365.230
11	Kab. Lamandau	KP	0	93.364.000	93.364.000
12	Kab. Seruyan	KK	0	37.492.000	37.492.000
XVIII	Kalimantan Selatan		695.659.464.000	7.999.305.441	703.658.769.441
1	Kab. Kotabaru	KP, KK, PKP2B	155.932.000.000	2.614.450.510	158.546.450.510
2	Kab. Tanah Bumbu	KP, KK, PKP2B	143.425.000.000	1.459.882.192	144.884.882.192
3	Kab. Tabalong	PKP2B	103.001.899.000	567.619.325	103.569.518.325
4	Kab. Balangan	PKP2B	100.615.333.000	532.098.294	101.147.431.294
5	Kab. Banjar	KP, KK, PKP2B	85.478.400.000	740.981.650	86.219.381.650
6	Kab. Tanahlaut	KP, KK, PKP2B	62.908.800.000	955.448.070	63.864.248.070
7	Kab. Tapin	KP, PKP2B	26.817.453.360	393.629.050	27.211.082.410
8	Kab. Hulu Sungai Selatan	KP, PKP2B	11.074.178.640	424.558.750	11.498.737.390
9	Kota Banjarbaru	KK, PKP2B	6.406.400.000	188.224.400	6.594.624.400
10	Kab. Hulu Sungai Tengah	PKP2B	0	122.413.200	122.413.200

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XIX	Kalimantan Timur		1.668.569.630.000	11.653.584.343	1.680.223.214.343
1	Kab. Kutai Timur	KP, PKP2B	933.751.000.000	2.309.061.170	936.060.061.170
2	Kab. Kutai Kartanegara	KP, PKP2B	211.550.430.000	4.159.320.801	215.709.750.801
3	Kab. Kutai Barat	KK, PKP2B	216.962.200.000	1.795.816.750	218.758.016.750
4	Kab. Pasir	KP, PKP2B	141.050.000.000	851.567.382	141.901.567.382
5	Kab. Berau	KP, PKP2B	84.994.000.000	1.218.611.650	86.212.611.650
6	Kota Samarinda	KP, PKP2B	55.737.500.000	372.381.490	56.109.881.490
7	Kab. Nunukan	KP, PKP2B	20.702.500.000	334.946.000	21.037.446.000
8	Kab. Malinau	KP	2.457.000.000	92.177.500	2.549.177.500
9	Kab. Penajam Paser Utara	KP	1.365.000.000	106.250.000	1.471.250.000
10	Kab. Bulungan	KP, PKP2B	0	392.221.300	392.221.300
11	Kota Bontang	PKP2B	0	21.230.300	21.230.300
XX	Nusa Tenggara Barat		105.378.000.000	2.604.419.500	107.982.419.500
1	Kab. Sumbawa Barat	KK	105.378.000.000	1.403.766.000	106.781.766.000
2	Kab. Sumbawa	KK	0	986.076.000	986.076.000
3	Kab. Dompu	KP, KK	0	173.836.000	173.836.000
4	Kab. Bima	KP, KK	0	40.741.500	40.741.500
XXI	Nusa Tenggara Timur		227.500.000	56.161.000	283.661.000
1	Kab. Manggarai	KP	227.500.000	46.296.000	273.796.000
2	Kab. Manggarai Barat	KP	0	9.865.000	9.865.000
XXII	Sulawesi Utara		2.120.419.683	1.837.569.125	3.957.988.808
1	Kab. Bolaang Mangondow	KP, KK	2.120.419.683	1.647.552.200	3.767.971.883
2	Kab. Minahasa Utara	KP, KK	0	107.835.963	107.835.963
3	Kab. Minahasa Tenggara (Mitra)	KK	0	61.943.700	61.943.700
4	Kota Bitung	KK	0	10.101.228	10.101.228
5	Kab. Bolaang Mangondow Utara	KK	0	9.844.835	9.844.835
6	Kota Manado	KK	0	291.200	291.200
XXIII	Gorontalo		0	186.412.515	186.412.515
1	Kab. Bone Bolango	KK	0	82.059.250	82.059.250
2	Kab. Gorontalo	KP, KK	0	40.858.300	40.858.300
3	Kab. Gorontalo Utara	KP	0	33.150.000	33.150.000
4	Kab. Pohuwato	KK	0	25.444.965	25.444.965
5	Kab. Boalemo	KP	0	4.900.000	4.900.000
XXIV	Sulawesi Tengah		0	848.117.395	848.117.395
1	Kab. Morowali	KP, KK	0	383.480.900	383.480.900
2	Kab. Banggai	KP	0	200.306.500	200.306.500
3	Kab. Parigi Moutong	KK	0	118.371.000	118.371.000
4	Kota Palu	KK	0	52.299.975	52.299.975
5	Kab. Donggala	KK	0	42.610.750	42.610.750
6	Kab. Toli-toli	KK	0	39.926.250	39.926.250
7	Kab. Buol	KK	0	11.122.020	11.122.020

No.	Propinsi/Kab./Kota	Jenis Pengusahaan	Perkiraan Penerimaan		
			Royalti (Rp)	Landrent (Rp)	Jumlah (Rp)
XXV	Sulawesi Selatan		201.084.102.406	1.352.620.370	202.436.722.776
1	Kab. Luwu Timur	KK	201.084.102.406	1.033.523.400	202.117.625.806
2	Kab. Luwu	KK	0	124.010.250	124.010.250
3	Kab. Luwu Utara	KP, KK	0	88.899.500	88.899.500
4	Kab. Sidenreng Rapang	KK	0	60.537.750	60.537.750
5	Kab. Enrekang	KK	0	15.169.700	15.169.700
6	Kab. Bone	KP	0	9.200.000	9.200.000
7	Kab. Jeneponto	KP	0	8.970.000	8.970.000
8	Kab. Takalar	KP	0	8.073.720	8.073.720
9	Kab. Wajo	KK	0	4.236.050	4.236.050
XXVI	Sulawesi Tenggara		46.782.527.433	1.456.844.600	48.239.372.033
1	Kab. Kolaka	KP, KK	46.782.527.433	399.771.100	47.182.298.533
2	Kab. Konawe	KP, KK	0	659.365.100	659.365.100
3	Kab. Konawe Selatan	KP, KK	0	135.604.700	135.604.700
4	Kab. Kolaka Utara	KK	0	123.022.900	123.022.900
5	Kab. Bombana	KP, KK	0	88.549.900	88.549.900
6	Kab. Buton	KP	0	50.530.900	50.530.900
XXVII	Maluku		0	8.039.000	8.039.000
1	Kab. Maluku Tenggara	KP	0	4.750.000	4.750.000
2	Kab. Maluku Tenggara Barat	KP	0	3.289.000	3.289.000
XXVIII	Maluku Utara		192.707.056.748	2.531.774.950	195.238.831.698
1	Kab. Halmahera Timur	KP	169.958.091.461	1.164.685.400	171.122.776.861
2	Kab. Halmahera Utara	KP, KK	21.368.119.500	919.872.500	22.287.992.000
3	Kab. Halmahera Tengah	KP, KK	1.380.845.787	351.564.100	1.732.409.887
4	Kab. Halmahera Selatan	KP	0	85.780.950	85.780.950
5	Kab. Halmahera Barat	KP	0	9.872.000	9.872.000
XXIX	Papua		1.714.349.000.000	3.343.471.950	1.717.692.471.950
1	Kab. Mimika	KK	1.714.349.000.000	734.256.250	1.715.083.256.250
2	Kab. Paniai	KK	0	711.069.450	711.069.450
3	Kab. Nabire	KK	0	683.978.750	683.978.750
4	Kab. Sarmi	KK	0	482.036.100	482.036.100
5	Kab. Keerom	KK	0	178.246.250	178.246.250
6	Kab. Tolikara	KK	0	185.326.050	185.326.050
7	Kab. Puncak Jaya	KK	0	125.079.500	125.079.500
8	Kab. Pegunungan Bintang	KK	0	68.818.750	68.818.750
9	Kab. Waropen	KK	0	96.232.500	96.232.500
10	Kab. Jayawijaya	KK	0	40.959.100	40.959.100
12	Kab. Manokwari	KK	0	0	0
11	Kab. Jayapura	KK	0	37.469.250	37.469.250
XXX	Papua Barat		1.743.927.021	416.430.660	2.160.357.681
1	Kab. Raja Empat	KP, KK	1.743.927.021	89.513.160	1.833.440.181
2	Kab. Kaimana	KK	0	326.917.500	326.917.500
Jumlah			5.237.244.877.356	66.568.791.573	5.303.813.668.929



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal

Waryono Karno

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 2821 K/80/MEEM/2007

TANGGAL : 29 Oktober 2007

**DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH
PENGHASIL MINYAK BUMI (LIFTING) UNTUK TAHUN 2008**

NO.	WILAYAH	TAHUN 2008	
		MINYAK BUMI	(RIBU BAREL)
A.	0 - 4 MIL LAUT		313.610,76
I.	NAD		3.902,66
		1. Aceh Timur	18,30
		2. Aceh Utara	3.001,20
		3. Aceh Tamiang	883,16
II.	Sumatera Utara		621,10
		4. Langkat	512,40
		5. Binjai	108,70
III.	Riau		154.053,79
		6. Bengkalis	74.024,47
		7. Indragiri Hulu	881,66
		8. Kampar	16.263,85
		9. Rokan Hulu	546,77
		10. Rokan Hilir	28.857,95
		11. Siak	32.837,47
		12. Palalawan	641,63
IV	KEP. Riau		23.991,30
		13. Natuna	23.991,30
V.	Jambi		12.888,14
		14. Batang Hari	489,89
		15. Muaro Jambi	1.208,90
		16. Kota Jambi	699,79
		17. Tanjung Jabung Timur	3.552,48
		18. Tanjung Jabung Barat	4.861,86
		19. Sarolangun	1.467,66
		20. Tebo	607,56
VI.	Sumatera Selatan		31.288,61
		21. Lahat	750,66
		22. Muara Enim	6.759,65
		23. Kota Prabumulih	1.627,97
		24. Musi banyuasin	16.678,15
		25. Banyuasin	1.024,17
		26. Musi Rawas	2.546,63
		27. Ogan Ilir	342,21
		28. Ogan Komering Ulu	1.559,16
VII.	Lampung		2.617,51
		29. Lampung Timur	2.617,51
VIII.	DKI Jakarta		3.612,08
		30. DKI Jakarta	3.612,08
IX.	Jawa-Barat		13.971,01
		31. Indramayu	2.322,64
		32. Karawang	1.250,68
		33. Majalengka	143,84
		34. Subang	651,48
		35. Bekasi	9.602,38

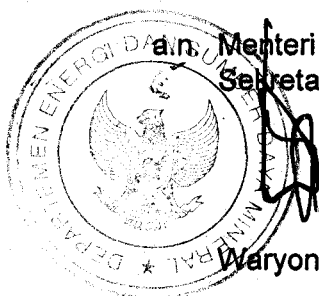
NO.	WILAYAH	TAHUN 2008	
		MINYAK BUMI	(RIBU BAREL)
X.	Jawa-Tengah		534,36
		36. Blora	534,36
XI.	Jawa-Timur		17.537,62
		37. Bojonegoro	13.194,46
		38. Bangkalan	753,96
		39. Sumenep	3.094,53
		40. Tuban	464,76
		41. Lamongan	29,92
XII.	Kalimantan-Selatan		2.333,25
		42. Tabalong	2.113,65
		43. Balangan	219,60
XIII.	Kalimantan-Timur		35.546,50
		44. Bulungan	1.009,79
		45. Nunukan	1.024,80
		46. Kota Tarakan	636,84
		47. Kota Samarinda	114,66
		48. Kutai Kertanegara	30.462,38
		49. Kutai Timur	1.117,76
		50. Panajam Paser Utara	838,43
		51. Kota Bontang	341,84
XIV.	Sulawesi Tengah	52. Morowali	2.562,00
XV.	Maluku	53. Seram Bagian Timur	2.137,44
XVI.	Papua Barat		6.013,38
		54. Teluk Bintuni	118,95
		55. Kab. Sorong	4.796,43
		56. Raja Ampat	1.098,00
B.	4 - 12 MIL LAUT		36.105,78
		1. Lampung	5.882,38
		2. Bangka Belitung	962,22
		3. Jawa-Barat	5.053,68
		4. Kalimantan-Timur	14.445,72
		5. Kep. Riau	1.145,58
		6. Jawa Timur	8.616,19
C.	> 12 MIL LAUT	PEMERINTAH PUSAT	28.728,38



a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris Jenderal

Waryono Karno

NO.	WILAYAH	TAHUN 2008	
		GAS BUMI	(RIBU MMBTU)
X.	Kalimantan-Timur		624.839,35
		26. Kota Tarakan	8.645,00
		27. Kota Samarinda	3.622,85
		28. Kutai Kertanegara	611.020,37
		29. Panajam Paser Utara	151,71
		30. Kota Bontang	1.399,42
XI.	Sulawesi-Selatan	31. Wajo	10.761,70
XII.	Papua Barat		635,00
		32. Kab. Sorong	635,00
B.	4 - 12 MIL LAUT		487.617,73
		1 . Jawa-Barat	34.901,84
		2 . Kalimantan-Timur	349.712,13
		3 . Kep. Riau	44.320,00
		4 . Jawa Timur	58.683,76
C.	> 12 MIL LAUT	PEMERINTAH PUSAT	272.795,71



an Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 Sekretaris Jenderal

Waryono Karno